

Reformasi Birokrasi melalui Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan

Rudi Kuswandi¹, Syamsir²

^{1,2} Departement Magister Administrasi Public, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail rudikuswandi@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengawasan yang dijalankan oleh pihak Inspektorat dalam pemberantasan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap SKPD yang bermasalah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas terhadap program pengawasan Inspektorat pada umumnya dijalankan belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai Reformasi Birokrasi Melalui Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan interpretasi. Adapun hasil penelitian yakni pertama untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi, penerapan kebijakan pengawasan yang meliputi proses pemeriksaan dan pengujian. Faktor pendukung utama dalam efektivitas implementasi program kebijakan sistem pengawasan termasuk dukungan penuh dari pimpinan daerah, alokasi sumber daya yang memadai, dukungan politik dari pimpinan daerah, pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai, serta pemanfaatan teknologi dan informasi. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya efektivitas komunikasi dalam organisasi

Kata kunci: *Reformasi Birokrasi, Kebijakan, Pengawasan*

Abstract

This research is motivated by the lack of supervision carried out by the Inspectorate in eradicating violations committed by each problematic SKPD. In carrying out the functions and duties of the Inspectorate's supervision program in general, it is not carried out in accordance with established procedures. The purpose of this research is to explore more deeply about Bureaucratic Reform through the Effectiveness of the Implementation of the Supervisory System Policy Program. A qualitative approach was used in this research, where data were obtained from literature study, observation, interviews, and documentation. Data analysis is done through reduction, presentation, and interpretation. The results of the

study are first, to improve Bureaucratic Reform, the implementation of supervisory policies which include the inspection and testing process. The main supporting factors in the effectiveness of the implementation of the supervisory system policy program include full support from regional leaders, adequate resource allocation, political support from regional leaders, employee training and capacity building, and the use of technology and information. However, there are several inhibiting factors that need to be overcome, such as resistance to change from within the organization, limited resources, and lack of communication effectiveness within the organization.

Keywords: *Bureaucratic Reform, Policy, Supervision*

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang sejalan dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Dalam mengelola sistem pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab walikota/Bupati sedangkan di tingkat provinsi merupakan tanggung jawab Gubernur. Namun didalam menjalankan tugasnya para pemimpin tentu memiliki keterbatasan, maka diperlukan bantuan dari bawahannya untuk menyelesaikannya. Berdasarkan peraturan Kota Sungai Penuh PERWALI No 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat kota sungai penuh. Inspektorat Kota Sungai Penuh memiliki tugas dan fungsi yaitu: merencanakan program pengawasan, pemeriksaan, perumusan kebijakan, pengusutan serta pengujian.

Tujuan dari pengawasan yakni untuk meningkatkan efisiensi dan integritas aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan akhir mencapai pemerintahan yang transparan dan bersih serta membangun birokrasi yang efektif. Namun, dalam menghadapi tuntutan Reformasi yang mendorong partisipasi kritis masyarakat, formulasi program pengawasan harus lebih komprehensif. Hal ini diperlukan untuk merespons keluhan dan aspirasi masyarakat serta untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan guna memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan di masa depan. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi, yang transparan dan efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Namun dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Kota Sungai Penuh masih mengalami hambatan dan belum sesuai apa yang diharapkan dan diamanatkan oleh PERWALI No 30 Tahun 2016 hal tersebut terlihat dari temuan peneliti dilapangan seperti kurangnya pengawasan yang dijalankan oleh pihak Inspektorat dalam pemberantasan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap SKPD yang bermasalah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas terhadap program pengawasan Inspektorat pada umumnya dijalankan belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga permasalahan tersebut.

Kajian tentang reformasi birokrasi yang telah dilakukan lebih terfokus pada beberapa aspek. Pertama merupakan studi mengenai reformasi dalam menuju good governance (Hayat, 2020; Hidayat, 2022; Yustia & Arifin, 2023) Sedangkan yang kedua

mengenai reformasi birokrasi dalam menghadapi revolusi 5.0 (. & Mu'in, 2024; S. Amalia, 2018; Cornell et al., 2020; Faedlulloh et al., 2020; Wulandari, 2023) Dari beberapa ulasan diatas bahwa terlihat jelas belum ada yang lebih spesifik mengeksplorasi lebih dalam mengenai Reformasi Birokrasi Melalui Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan dalam literatur pada saat ini. Padahal dengan adanya melakukan reformasi sistem kebijakan akan mampu mengontrol dari perilaku masyarakat yang bekerja di pemerintahan baik itu di Kabupaten/Kota maupun provinsi.

Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu mengenai reformasi birokrasi. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai Reformasi Birokrasi Melalui Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan data baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, termasuk observasi langsung untuk memahami berbagai aspek yang relevan dengan penelitian ini, yang berguna untuk memetakan Reformasi Birokrasi Melalui Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan. Sementara itu, data sekunder dapat diperoleh dari laporan-laporan resmi pemerintah terkait dengan program reformasi birokrasi, data statistik terkait kinerja pemerintah daerah, atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sama. Lokasi penelitian adalah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Sementara itu Proses penelitian selama 4 bulan, langkah-langkah yang dilakukan meliputi studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena Reformasi Birokrasi dan Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan tugas oleh Inspektorat Kota Sungai Penuh terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Sungai Penuh. Data yang lebih detail dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai informan, dengan tujuan untuk memahami secara lebih mendalam aktivitas dan tugas mereka sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan

1. Pemeriksaan

Implementasi kebijakan di Inspektorat Kota Sungai Penuh dalam program pengawasan mencerminkan prinsip-prinsip teori implementasi kebijakan yang diajukan oleh Widodo dalam (Sahlania & Mana, 2023) Teori ini menggambarkan implementasi sebagai suatu proses yang melibatkan sumber daya manusia, dana, dan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Di Inspektorat Kota Sungai Penuh, penerapan kebijakan pengawasan menunjukkan penggunaan yang efektif dari sumber daya manusia dengan menempatkan staf yang terlatih dan kompeten di posisi kunci. Selain itu, alokasi dana yang memadai memastikan

bahwa program-program pengawasan dapat berjalan tanpa hambatan finansial. Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang canggih juga mendukung kemampuan organisasional, memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih efisien, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat waktu. Pada tahap pemeriksaan dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya:

Pertama, pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber yang relevan dengan fungsi pengawasan, baik itu dokumen tertulis maupun informasi lapangan. Sumber data mencakup laporan keuangan, catatan operasional, hasil audit sebelumnya, serta informasi dari observasi langsung di lapangan. Proses pengumpulan ini memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, seperti staf internal, auditor eksternal, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki informasi relevan. Selain itu, teknologi informasi dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengumpulan data yang cepat dan akurat. Penggunaan perangkat lunak manajemen data dan aplikasi mobile memungkinkan auditor mengumpulkan data di lapangan secara langsung dan mengunggahnya ke sistem pusat untuk analisis lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan aspek teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan waktu, untuk mendukung proses implementasi yang efektif. Dengan memiliki data yang lengkap dan akurat, Inspektorat Kota Sungai Penuh dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan mengambil keputusan berdasarkan informasi.

Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan di lapangan oleh tim auditor Inspektorat, yang memungkinkan verifikasi langsung terhadap data tertulis dan memastikan kebenaran temuan lapangan. Proses pemeriksaan ini melibatkan inspeksi fisik, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung untuk mengumpulkan bukti konkret mengenai kondisi di lapangan. Auditor mendatangi lokasi yang relevan untuk mengecek kesesuaian antara data yang tercatat dan kenyataan yang ada, serta mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin tidak terdeteksi melalui dokumen tertulis saja. Langkah ini konsisten dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya penggunaan bukti konkret dalam setiap tahap proses implementasi. Dengan memastikan bahwa setiap masalah yang ditemukan didasarkan pada bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, Inspektorat dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Bukti-bukti yang dikumpulkan dari lapangan memberikan dasar yang kuat untuk membuat rekomendasi perbaikan, menetapkan langkah-langkah korektif, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya berdasarkan data teoretis tetapi juga realitas yang ada di lapangan, sehingga meningkatkan kredibilitas dan efektivitas keseluruhan proses pengawasan.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh tim auditor Inspektorat berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra), memastikan bahwa semua aspek pengawasan tercover dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Renja dan Renstra memberikan panduan yang jelas dan sistematis mengenai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang harus dicapai, sehingga setiap langkah pengawasan dapat dilakukan dengan fokus dan terarah. Auditor mengikuti pedoman ini

untuk memastikan bahwa pengawasan mencakup semua aspek penting yang telah direncanakan dan bahwa tidak ada area kritis yang terabaikan. Hal ini mencakup verifikasi prosedur, evaluasi kinerja, dan pengecekan kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil oleh tim auditor berdasarkan pedoman ini mampu mencerminkan komitmen terhadap standar yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya memiliki rencana yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan mematuhi pedoman Renja dan Renstra, Inspektorat Kota Sungai Penuh dapat melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien, mengidentifikasi dan menangani masalah dengan tepat waktu, serta memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mencapai hasil yang diharapkan. Dengan perencanaan yang matang dan sistematis, Inspektorat dapat menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pengawasan. Implementasi kebijakan pengawasan yang konsisten dengan prinsip-prinsip teori implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan efektivitas keseluruhan proses pengawasan

2. Pengujian

Dalam menjalankan pengujian data yang ditemukan secara langsung di lapangan serta data-data yang telah terdokumentasi secara tertulis, tim auditor dari Inspektorat Kota Sungai Penuh mengikuti serangkaian langkah yang esensial. Tahap awal proses ini mencakup penghimpunan informasi yang terkait dengan isu-isu yang diidentifikasi selama proses pemeriksaan. Langkah selanjutnya dilakukan dengan membandingkan data yang ditemukan di tempat inspeksi dengan informasi yang sudah dicatat sebelumnya, bertujuan untuk memverifikasi kecocokan dan konsistensi antara keduanya. Tahap akhir melibatkan pengujian lebih lanjut terhadap data yang menunjukkan potensi ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan, dengan tujuan memastikan bahwa tidak ada ketimpangan yang signifikan antara data yang terkumpul, baik yang ditemukan secara langsung maupun yang telah terdokumentasi. Proses ini sangat penting untuk menjaga integritas dan akurasi data yang menjadi dasar dalam melakukan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Sungai Penuh. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses pengawasan dapat dilaksanakan dengan keandalan yang tinggi, mencegah kemungkinan kesalahan atau ketidaktepatan dalam analisis dan keputusan yang dibuat berdasarkan data.

Secara menyeluruh, pelaksanaan kebijakan di Inspektorat Kota Sungai Penuh telah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta mengikuti arahan yang tertera dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Prosedur pengujian yang telah dijalankan memastikan bahwa setiap data yang digunakan dalam proses pengawasan terjamin akurat dan konsisten, sehingga dapat memberikan dukungan yang solid dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan tepat. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif dan efisien, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang menjadi tujuan utama. Pelaksanaan kebijakan di Inspektorat Kota Sungai Penuh dapat dianggap sebagai model implementasi yang komprehensif. Dengan mengacu pada undang-undang, peraturan,

serta dokumen rencana kerja dan strategis yang telah disusun, langkah-langkah pengawasan dilakukan dengan cermat untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Hal ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian tugas dan pekerjaan secara efisien, tetapi juga mendukung visi reformasi birokrasi yang diinginkan, mengukuhkan posisi Inspektorat sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam mendorong perubahan yang positif dalam pelayanan publik.

3. Pengusutan

Penerapan kebijakan program pengusutan di Inspektorat Kota Sungai Penuh telah dilakukan secara konsisten dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Setiap langkah implementasi memastikan bahwa tugas dan pekerjaan terkait program pengusutan dilakukan dengan ketepatan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian yang telah dilakukan menegaskan bahwa pelaksanaan program pengawasan kebijakan terkait pengusutan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, menunjukkan bahwa kebijakan ini telah dijalankan dengan baik dan efektif. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa Inspektorat Kota Sungai Penuh telah menjalankan program pengusutan dengan ketelitian dan konsistensi yang diperlukan. Pendekatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pengusutan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan tidak hanya menjadi landasan, tetapi juga menjadi jaminan bahwa tujuan pengusutan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif.

Dalam menjalankan proses pengusutan, pegawai Inspektorat Kota Sungai Penuh menegakkan praktik pemantauan yang berkesinambungan terhadap berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Langkah ini diawali dengan proses pemeriksaan dan pengujian yang cermat terhadap setiap kasus yang diselidiki. Hasil dari pengujian tersebut kemudian secara rutin dilaporkan kepada Kepala Daerah sebagai bentuk tanggapan yang langsung terhadap situasi yang ditemui. Dengan cara ini, setiap temuan tidak hanya diakui keberadaannya tetapi juga diberikan perhatian yang tepat dan segera. Pelaporan hasil pengusutan kepada Kepala Daerah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang teridentifikasi mendapat perhatian yang layak dari pihak berwenang. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan kepada pimpinan daerah, memungkinkan adanya respons yang cepat dan tepat terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan dan tindakan yang diambil dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan lengkap. Pendekatan ini juga memperkuat kerjasama antara Inspektorat dan pemerintah daerah dalam upaya penegakan integritas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Melalui proses pemantauan yang berkesinambungan dan pelaporan yang teratur, Inspektorat Kota Sungai Penuh membuktikan komitmennya dalam memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik secara keseluruhan.

Selain melaksanakan pemantauan terus-menerus terhadap temuan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan dan pengujian, pegawai Inspektorat Kota Sungai Penuh juga menjalankan tugas pengecekan dan pengawasan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi langkah yang krusial dalam memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi secara besar-besaran atau sistematis. Dengan adanya pengawasan yang terus-menerus, integritas data dapat dijaga dengan baik, memastikan bahwa setiap tindakan korektif dapat dilakukan dengan tepat waktu. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten oleh Inspektorat memainkan peran penting dalam menjaga kualitas dan keandalan setiap langkah dalam proses pengusutan. Ini memungkinkan pihak terkait untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, pengawasan yang ketat ini tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan dengan integritas dan transparansi yang tinggi. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan dalam pengecekan dan pengawasan, Inspektorat Kota Sungai Penuh memastikan bahwa program pengusutan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga berjalan efisien dan efektif. Dengan demikian, tujuan reformasi birokrasi untuk mencapai pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif dapat terwujud dengan lebih baik, memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Reformasi Birokrasi Melalui Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan

Implementasi kebijakan program pengawasan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Inspektorat Kota Sungai Penuh dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat dan pendukung. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap dan kecenderungan pelaksana. Faktor-faktor ini harus diperhatikan secara menyeluruh untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan di Inspektorat Kota Sungai Penuh adalah resistensi terhadap perubahan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Menurut teori perubahan organisasi oleh Kurt Lewin dalam (Widyaningrum & Nurdianti, 2022), resistensi terhadap perubahan merupakan reaksi alami, karena individu cenderung merasa nyaman dengan status quo yang telah mereka kenal dan jalani selama ini. Ketika ada upaya untuk memperkenalkan kebijakan baru atau mengubah prosedur yang sudah ada, reaksi awal sering kali berupa penolakan atau kekhawatiran. Pegawai yang sudah lama bekerja dengan metode dan prosedur lama biasanya merasa lebih aman dan terampil dengan cara kerja tersebut, sehingga merasa cemas terhadap perubahan yang mungkin mengganggu kenyamanan dan kebiasaan mereka. Pegawai yang telah lama bekerja dengan prosedur lama sering kali

menunjukkan keengganan untuk mengadopsi perubahan baru yang diperlukan oleh kebijakan pengawasan yang diperbarui. Mereka mungkin melihat perubahan ini sebagai ancaman terhadap rutinitas kerja mereka atau merasa ragu akan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan prosedur baru. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya sikap defensif atau bahkan proaktif dalam menolak perubahan, yang pada akhirnya memperlambat proses implementasi kebijakan. Ketidakpastian mengenai hasil dari perubahan tersebut juga bisa menjadi sumber kecemasan, yang membuat mereka lebih cenderung untuk mempertahankan cara kerja lama yang sudah mereka kuasai.

Resistensi terhadap perubahan ini tidak hanya memperlambat proses implementasi kebijakan, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas program pengawasan secara keseluruhan. Ketika pegawai tidak sepenuhnya mendukung atau memahami tujuan dari perubahan, mereka mungkin tidak melaksanakan kebijakan baru dengan sepenuh hati atau tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dengan akurat (Mulyawan, 2024; Putri et al., 2024). Hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan tugas dan mengurangi dampak positif yang diharapkan dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pimpinan Inspektorat Kota Sungai Penuh untuk mengatasi resistensi ini melalui pendekatan yang inklusif dan komunikatif, memastikan bahwa setiap pegawai merasa didengar dan dipahami, serta diberikan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang diinginkan.

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga ahli, merupakan kendala yang sangat penting dalam implementasi kebijakan di Inspektorat Kota Sungai Penuh. Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (D. Amalia et al., 2024), sumber daya adalah salah satu variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, Inspektorat tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan dengan efektif. Keterbatasan dana menghambat pengadaan alat dan teknologi yang diperlukan untuk proses pemeriksaan dan pengujian, serta mengurangi kemampuan untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai. Selain anggaran, keterbatasan tenaga ahli juga menjadi penghalang utama dalam optimalisasi proses pengawasan. Tenaga ahli yang kompeten sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan dengan tepat dan efektif. Kurangnya tenaga ahli berpengalaman dapat menyebabkan proses pengawasan menjadi lambat dan kurang akurat. Tanpa keahlian yang memadai, pegawai mungkin tidak mampu mengidentifikasi dan menangani masalah dengan benar, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas program pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat. Ini juga dapat berdampak pada kualitas laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada pihak berwenang, yang merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan.

Keterbatasan sumber daya ini secara keseluruhan menghambat tujuan reformasi birokrasi yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Sungai Penuh. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, tanpa dukungan anggaran yang cukup dan tenaga ahli yang kompeten, sulit bagi Inspektorat untuk mencapai standar tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya

upaya serius untuk meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pengembangan kapasitas pegawai dan pengalokasian anggaran yang memadai, guna memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi yang diinginkan.

Komunikasi yang kurang efektif dalam organisasi juga merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan di Inspektorat Kota Sungai Penuh. Menurut teori komunikasi organisasi, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan prosedur kebijakan (Atmaja & Dewi, 2018). Ketika informasi tidak tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu, dapat terjadi miskomunikasi yang menyebabkan kebingungan di antara pegawai. Misalnya, jika petunjuk mengenai prosedur pengawasan tidak disampaikan dengan detail, pegawai mungkin akan menerapkan metode yang berbeda-beda, yang akhirnya menghasilkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan tugas. Miskomunikasi ini dapat menyebabkan berbagai kesalahpahaman yang berdampak negatif pada konsistensi dan efisiensi implementasi kebijakan. Pegawai organisasi mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai prioritas dan cara pelaksanaan kebijakan, yang dapat mengakibatkan tindakan yang tidak terkoordinasi dan tumpang tindih. Kesalahpahaman ini sering kali berujung pada kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika ada perbedaan pemahaman tentang prosedur pelaporan hasil pengawasan, beberapa temuan penting mungkin tidak dilaporkan dengan benar atau tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem komunikasi di dalam lingkungan organisasi. Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa informasi disampaikan secara jelas, lengkap, dan tepat waktu melalui saluran komunikasi yang efektif, seperti rapat rutin, memo internal, dan platform komunikasi digital. Selain itu, penting untuk mendorong budaya komunikasi terbuka di mana pegawai merasa nyaman untuk bertanya dan memberikan umpan balik. Dengan memastikan bahwa semua pegawai memiliki akses yang sama terhadap informasi dan pemahaman yang konsisten tentang kebijakan dan prosedur, Inspektorat Kota Sungai Penuh dapat meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam implementasi kebijakan, serta mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi yang lebih efektif.

2. Faktor Pendukung

Adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam implementasi kebijakan di Inspektorat Kota Sungai Penuh. Menurut teori kepemimpinan transformasional, dukungan dan komitmen dari pimpinan tertinggi dapat memberikan dorongan moral dan motivasi yang kuat bagi pegawai (Hidayanto & Kurniawan, 2022; Iqbal, 2021). Pimpinan yang aktif terlibat dan menunjukkan komitmen nyata terhadap perubahan dan peningkatan kinerja organisasi dapat menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk bekerja dengan lebih semangat dan dedikasi. Dukungan ini menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana pegawai merasa dihargai dan didukung dalam menjalankan tugas mereka. Kepala daerah dan pejabat tinggi yang mendukung reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan. Dengan

dukungan dari pimpinan, Inspektorat dapat menerima anggaran yang memadai untuk melaksanakan program-program pengawasan yang telah direncanakan. Selain itu, dukungan tersebut juga memungkinkan pengadaan alat dan teknologi yang diperlukan, serta penyediaan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai. Pimpinan yang proaktif dalam menyediakan sumber daya ini membantu memastikan bahwa Inspektorat memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien.

Selain alokasi sumber daya, dukungan politik dari pimpinan daerah juga merupakan faktor kunci untuk keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan. Pimpinan yang mendukung dapat membantu mengatasi hambatan birokrasi dan memberikan perlindungan politik yang diperlukan ketika menghadapi resistensi terhadap perubahan(Erinaldi, 2024; Hamdillah, 2023). Dukungan politik ini penting untuk memberikan legitimasi dan otoritas kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Dengan adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah, Inspektorat Kota Sungai Penuh dapat lebih mudah mengimplementasikan kebijakan, mencapai tujuan reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai Inspektorat Kota Sungai Penuh merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut teori pembelajaran organisasi, pembelajaran berkelanjutan adalah kunci untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai(Basuki, 2023). Dengan menghadirkan program pelatihan yang berkesinambungan, Inspektorat dapat memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta menguasai teknik dan alat terbaru yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan efektif. Program pelatihan yang berkelanjutan memberikan berbagai manfaat bagi pegawai. Pertama, pelatihan ini membantu pegawai untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pengawasan dan regulasi, sehingga mereka dapat bekerja dengan metode yang paling up-to-date dan efisien. Kedua, pelatihan ini juga meningkatkan kepercayaan diri pegawai dalam menjalankan tugas-tugas mereka, karena mereka merasa lebih kompeten dan siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Dengan demikian, pelatihan yang terus-menerus tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis pegawai, tetapi juga memperkuat motivasi dan komitmen mereka terhadap pekerjaan.

Selain manfaat individu, program pelatihan yang berkelanjutan juga memberikan dampak positif pada organisasi secara keseluruhan. Dengan pegawai yang lebih terampil dan kompeten, Inspektorat Kota Sungai Penuh dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan juga menciptakan budaya belajar di dalam organisasi, di mana pegawai terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan kinerja mereka dan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, pelatihan dan pengembangan kapasitas bukan hanya faktor pendukung yang penting, tetapi juga investasi strategis

dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat.

Teknologi informasi yang berkembang di era modern merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengawasan di Inspektorat Kota Sungai Penuh. Menurut (Apriadi et al., 2024; Kurniawan, 2024) teori sistem informasi manajemen, penggunaan teknologi informasi yang efisien dapat secara signifikan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Dengan teknologi yang tepat, data dapat dikumpulkan secara real-time dan dianalisis dengan cepat, memungkinkan pegawai untuk membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan berdasarkan informasi yang akurat. Hal ini tidak hanya mempercepat proses kerja tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi dalam pengolahan data manual. Selain itu, teknologi informasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan. Sistem informasi yang canggih memungkinkan setiap langkah dalam proses pengawasan untuk direkam dan dilacak dengan jelas, sehingga menciptakan jejak audit yang dapat digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, semua data dan laporan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap Inspektorat tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Teknologi informasi juga memudahkan koordinasi antarbagian dalam organisasi. Dengan sistem yang terintegrasi, informasi dapat dibagikan secara efisien di seluruh departemen dan unit kerja, memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif. Misalnya, temuan dari satu bagian dapat segera diteruskan ke bagian lain yang relevan, memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja dengan informasi yang sama dan up-to-date. Ini mengurangi redundansi dan meningkatkan sinergi antarbagian, sehingga Inspektorat dapat berfungsi sebagai satu kesatuan yang kohesif. Dengan demikian, investasi dalam teknologi informasi yang canggih dan terintegrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendukung tujuan strategis jangka panjang dari reformasi birokrasi yang diinginkan.

SIMPULAN

Reformasi birokrasi dapat ditingkatkan melalui penerapan kebijakan pengawasan yang meliputi proses pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan dengan pendekatan sistematis yang didukung oleh data yang akurat dan teknologi informasi yang mutakhir. Dukungan penuh dari pimpinan daerah serta pelatihan berkelanjutan bagi pegawai juga terbukti sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, Inspektorat memiliki kapasitas yang baik dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yang berdampak positif pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik serta berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan yang optimal. Resistensi terhadap perubahan dari

dalam organisasi, keterbatasan sumber daya, dan komunikasi yang kurang efektif merupakan hambatan utama yang dapat mengurangi efektivitas program pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat Kota Sungai Penuh untuk mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan komunikatif, serta meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung yang ada, Inspektorat dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- . Z., & Mu'in, F. (2024). Strengthening the Legislative Supervisory Function in the Provision of Human Resources in Era 5.0 Perspective of Fiqh Siyash. *KnE Social Sciences*, 2024(1), 96–105. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14969>
- Amalia, D., Rochim, A. I., & Rahmadanik, D. (2024). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna Menunjang Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 4(02), 125–131.
- Amalia, S. (2018). Reformasi Birokrasi 4.0: Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 21(2).
- Apriadi, A., Mokoginta, M. B. R., & Kuntadi, C. (2024). PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN TERHADAP LAPORAN KINERJA AUDIT. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5).
- Atmaja, S., & Dewi, R. (2018). Komunikasi Organisasi (Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis). *Inter Komunika*, 3(2), 192–206.
- Basuki, N. (2023). Mengoptimalkan modal manusia: Strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 182–192.
- Cornell, A., Knutsen, C. H., & Teorell, J. (2020). Bureaucracy and Growth. *Comparative Political Studies*, 53(14), 2246–2282. <https://doi.org/10.1177/0010414020912262>
- Erinaldi, E. (2024). Transformasi Menuju Pelayanan Publik Berkualitas di Era Digital. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4).
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan revolusi industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi mitos dalam agenda reformasi birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 313–336.
- Hamdillah, H. (2023). Inovasi Pelayanan Publik dan Transformasi Birokrasi. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 91–102.
- Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1–26.
- Hidayanto, N. R., & Kurniawan, I. S. (2022). Pengaruh kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, motivasi ekstrinsik, dan keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasional. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19(4), 731–739.
- Hidayat, A. F. (2022). Towards Bureaucratic Reform to Achieve Good Governance. *Journal of Governance*, 7(4), 855–863. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i4.17743>

- Iqbal, M. (2021). Kepemimpinan Transformasional Dalam Upaya Pengembangan Sekolah/Madrasah. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 10(3).
- Kurniawan, A. F. (2024). Peran Sistem Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 936–948.
- Mulyawan, W. (2024). Evaluasi Etika Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bima: Menjaga Dignitas dan Kesejahteraan Masyarakat. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 85–100.
- Putri, F., Amanda, N., Fitrah, I., Sari, F. M., & Putri, H. Y. (2024). REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), 101–111.
- Sahlania, O., & Mana, R. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Laika Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 14(1), 22–29.
- Widyaningrum, B., & Nurdianti, R. R. S. (2022). Teori Manajemen Perubahan Kurt Lewin: Kajian dalam Menghadapi Disrupsi Pendidikan Post-Covid 19. *Prosiding SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER Fakultas Ekonomi*, 1, 297–307.
- Wulandari, S. (2023). Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 4(2), 51–61.
- Yustia, D. A., & Arifin, F. (2023). Bureaucratic reform as an effort to prevent corruption in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>